

Sambutan dan Arahan  
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

“Tantangan Dan Peluang Kemitraan Antar Sektor Dalam Pembangunan  
Kependudukan Berkelanjutan di Indonesia”

Dalam acara:

**“KONSOLIDASI NASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA  
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2020”**

Yth. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Ibu Dr.  
DwiListyawardani

Yth. Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian  
Penduduk

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang  
membawahi bidang pengendalian penduduk atau yang mewakili

Yth. Para undangan dan peserta pertemuan yang berbahagia

Assalamu’alaikum Warohmatullohi wa barokatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah  
memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk kita semua dapat  
bertatap muka pada hari ini, pada acara pembukaan “Konsolidasi  
Program Bangga Kencana Bidang Pengendalian Penduduk Tahun  
2020”, walaupun tidak secara langsung namun Saya sangat senang  
dapat bersama Anda semuanya dari seluruh Indonesia hari ini. Saya  
sampaikan sambutan yang sangat hangat kepada semua peserta  
dalam pertemuan ini.

Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat, serta  
sangat menghargai upaya panitia, Kedeputian Bidang Pengendalian  
Penduduk, untuk diselenggarakannya pertemuan khusus konsolidasi  
nasional program Bangga Kencana Bidang Pengendalian Penduduk,

ditengah “*pagebluk nasional pandemic covid 19*”melalui metode daring (dalam jaringan) *Webex conference*. Diharapkan pertemuan ini akan secara konstruktif menyumbangkan ide untuk mendapatkan solusi dari berbagai masalah program Bangga Kencana, baik itu menyangkut permasalahan koordinasi serta keselarasan program nasional maupun daerah, maupun kemitraan lintas-sektor, untuk mencapai tujuan dari pembangunan kependudukan yang berkelanjutan secara nasional maupun kewilayahan.

### **Peserta Pertemuan yang saya banggakan.**

Penduduk sebagai *human capital* (subjek) dan *human resource* (objek) harus menjadi titik sentral dalam pembangunan kependudukan berkelanjutan di Indonesia yang mencakup seluruh siklus hidup manusia [*life cycle approach*). Yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan adalah bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai penerima manfaat hasil pembangunan tetapi juga sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Oleh karenanya program Bangga Kencana harus peka terhadap perkembangan zaman, harus terus relevan dengan kondisi masyarakat. Jaman berubah, tantangan pun berbeda dari masa ke masa. Sasaran utama program Bangga Kencana saat ini adalah generasi X, millenials dan Zillentials. Generasi-generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000an.

Para Millenials dan pasca Millenials menjadi istimewa karena generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan konsep diri, konsep hidup dan tata cara mereka membentuk, menentukan ukuran (jumlah) serta mengelola keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas.Mereka adalah generasi yang mau menerima sesuatu jika hal tersebut relevan dengan merekadan

dianggap mempunyai manfaat serta menguntungkan untuk hidup mereka. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang berbeda dalam memberikan pemahaman program karena pendekatan untuk era *Baby boomer* (lahir di era 1946-1955), generasi pasca Revolusi Kemerdekaan yang masih kental dengan nuansa komunikasi satu arah, informasi dan teknologi yang belum melimpah, serta pemerintah adalah pemain tunggal dan utama dari keseluruhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang apabila kita bandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi dewasa ini menjadi kurang relevan lagi. Saat ini sasaran kampanye Program Bangga Kencana adalah mereka yang berusia di bawah 40 tahun, sehingga dibutuhkan cara yang lebih tepat untuk memperkenalkan Program Bangga Kencana di kelompok usia tersebut.

Dalam era di mana khalayak sasaran sudah berubah dan kondisi banjir informasi yang tidak akurat baik mengenai produk, tata cara maupun informasi perilaku yang berkaitan dengan keluarga, kependudukan serta KB (alat, tata cara maupun efek samping), maka kita semua perlu membangun posisi baru (***repositioning***) sebagai ***confirmatory*** bahkan lebih jauh lagi adalah sebagai **juri** atas kesimpangsiuran tersebut, sehingga masyarakat menempatkan Program Bangga Kencana dalam posisi yang tetap relevan dan terpercaya dalam informasi Pembangunan Keluarga berkualitas, kependudukan serta keluarga berencana. Salah satu langkah yang harus mulai dilakukan oleh kita semua sebagai pengelola program adalah dengan memosisikan diri kita sebagai "Sahabat yang membantu keluarga Indonesia dalam merencanakan kehidupan yang berkualitas" dengan melakukan rebranding serta melakukan kampanye yang lebih "mengena" untuk generasi muda,

mulai dari perubahan logo, tagline dan adanya jingle yang lebih sesuai dengan selera generasi muda.

### **Peserta Pertemuan yang Saya banggakan**

Pada laporan yang berjudul “Integrating Population Issues into Sustainable Development” (Mengintegrasikan Permasalahan Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan) tahun 2015, PBB mengeluarkan laporan mengenai proyeksi isu kependudukan yang akan dihadapi dunia hingga 2030. Isu utama dalam laporan ini pada dasarnya adalah dampak sosial dan ekonomi yang akan dihadapi dunia dengan meningkatnya jumlah penduduk yang mendekati skala eksponensial. Usaha menghadapi pertumbuhan penduduk dan dampak luas yang akan disebabkan nya menghasilkan rancangan isu dan agenda kependudukan global.

Dalam konteks Indonesia maka kerangka isu ini setidaknya menggambarkan sebelas (11) isu strategis di bidang kependudukan yang akan dihadapi sebagai berikut.

#### **1. Isu Meningkatnya Fertilitas**

Peningkatan jumlah kelahiran pada beberapa daerah berimplikasi langsung pada kondisi masyarakat. Kondisi menjadi semakin signifikan pada daerah dengan penghasilan yang rata-rata rendah, tingkat kemiskinan dan kasus malnutrisi/stunting tinggi, tingkat capaian pendidikan dan ketersediaan layanan pendidikan yang rendah, layanan kesehatan minim, dan tingkat kematian bayi yang tinggi. Permasalahan paling serius adalah bahwa masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah, cenderung lebih cepat menikah dan merencanakan memiliki keturuanan dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan tinggi; proses yang berdampak pada kesejahteraan keluarga dan berpotensi

meningkatkan kemiskinan dan mewariskan kemiskinan yang kepada generasi berikutnya.

## **2. Isu Meningkatnya Penyediaan Layanan Pendidikan**

Persoalan yang akan dihadapi dalam kaitannya dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup penting adalah penyediaan layanan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang berkorelasi langsung mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) serta menjadi syarat mutlak dalam merubah dari keunggulan kuantitas jumlah masyarakat yang besar menjadi keunggulan kualitas angkatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam pelaksanaannya, proses ini menitik-beratkan pada terpenuhi jaminan layanan pendidikan bagi anak-anak pada usia sekolah.

Ada dua dampak yang harus diperhatikan dan di-mitigasi dengan baik. Pertama, meningkatnya angka kelahiran akan berbanding lurus dengan penyediaan layanan pendidikan, sehingga akan mendorong meningkatnya pengeluaran/anggaran pemerintah dalam bidang pendidikan. Pengendalian dampak ini sangat penting terutama pada daerah-daerah dengan kondisi anggaran dan layanan pendidikan yang kurang memadai, mereka dituntut untuk membuat perhitungan yang matang dalam penyediaan sarana-prasaran pendidikan dan skema jaminan pendidikan bagi kelompok umur sekolah.

Kedua, usaha mengkonversi jumlah penduduk yang besar akibat tingkat kelahiran tinggi menjadi keunggulan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di era sekarang ini membutuhkan peningkatan sekolah dengan spesifikasi teknik dan vokasional, serta usaha mengkapitalisasi struktur umur penduduk menjadi modal pembangunan yang berkualitas

ini akan berimplikasi pada meningkatnya daya saing ekonomi daerah. Namun demikian, kegagalan mengelolanya juga akan menimbulkan berbagai dampak yang sangat berat, meningkatkannya beban fiskal daerah, meningkatnya tekanan sosial, tekanan ekonomi, serta keamanan yang berbanding lurus dengan tekanan penduduk.

### **3. Isu Penduduk Muda**

Kelompok penduduk muda merepresentasikan premis penting dalam pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan perubahan sosial pada sebuah masyarakat maupun negara. Kelompok muda dan remaja ini menjadi penting sebab pada periode ini merupakan waktu dimana terjadi perubahan fisik, psikologis, dan relasi sosial bagi individu; dimana mereka akan mulai berperan secara mandiri pada satu sisi, dan pada saat yang sama membentuk beragam perilaku yang akan mempengaruhi perjalanan hidup mereka selanjutnya. Fase ini membuka peluang bagi kelompok muda dalam mengembangkan diri yang dapat mempengaruhi karir mereka, relasi dalam keluarga dan masyarakat, serta pola kehidupan seksual dan reproduktif yang baik untuk kelangsungan hidup antar-generasi. Namun fase ini juga membuka kemungkinan beragam perilaku negatif seperti konsumsi rokok, konsumsi minuman beralkohol, konsumsi narkoba, budaya kekerasan, hingga seks bebas dan beragam perilaku yang memiliki implikasi negatif lainnya baik bagi kesehatan maupun aspek sosial ekonomi mereka.

Dalam menangani berbagai isu pada kelompok muda dengan demikian tidak hanya membutuhkan strategi yang spesifik, namun juga pemahaman yang tepat tentang kondisi kelompok muda tersebut. Terutama perilaku yang disebabkan pengaruh eksternal keluarga seperti media sosial dan masyarakat lingkungan sekitar. Usaha edukasi budaya hidup sehat, perilaku reproduksi yang sehat, dan peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan potensi kerja menjadi skema

strategis yang perlu dibangun. Catatan penting yang perlu diperhatikan juga adalah kemampuan daerah dalam menyerap kelompok muda dalam dunia kerja; sebab salah satu potensi terbesar yang dapat mengganggu proyeksi pertumbuhan daerah adalah migrasi yang dilakukan oleh kelompok muda dalam usaha mencari penghidupan yang lebih baik.

#### **4. Isu Usia Reproduksi dan Pemberdayaan Perempuan**

Peningkatan kualitas dan peran perempuan merupakan hal penting bagi pembangunan dalam aspek kependudukan. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam pendidikan dan skill yang berorientasi pada pekerjaan yang baik menjadi bagian dalam proses pembangunan ekonomi. Masuknya perempuan dalam dunia kerja berarti menambah jumlah angkatan kerja dan kualitas tenaga kerja perempuan merupakan tambahan tenaga profesional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, meningkatnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan dalam lingkungan kerja berkorelasi positif terhadap kemampuan mereka dalam merencanakan pernikahan, waktu memiliki anak, gaya hidup dan reproduksi yang sehat, dan memperkecil potensi kekerasan pada perempuan. Inilah yang menyebabkan isu pemberdayaan perempuan bukan hanya strategis bagi daerah, namun juga bagian dari menjaga kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk.

#### **5. Isu Meningkatnya Penduduk Lansia**

Peningkatan kualitas hidup dan angka harapan hidup secara efektif menjadikan kelompok lansia menjadi bagian dalam struktur umur dengan pertumbuhan yang paling pesat. Proses ini setidaknya membawa tiga isu penting:

Pertama, adalah jaminan hari tua bagi kelompok lansia. Jaminan hari tua terutama berhubungan dengan skema pensiun yang akan diberikan kepada kelompok lansia.

Kedua, adalah layanan kesehatan dan layanan publik bagi lansia. Meningkatnya umur menciptakan kondisi degeneratif bagi individu, hal ini menuntut pemerintah mengambil langkah kebijakan dalam memastikan kelompok penduduk berusia lanjut mampu mendapatkan kualitas hidup yang baik dengan tidak kehilangan aktivitasnya di ruang publik. Selain itu ketersediaan layanan publik yang ramah terhadap lansia juga menjadi tantangan penting dalam memastikan kesejahteraan lansia.

Dan ketiga, adalah skema pemberdayaan lansia. Pada berbagai kasus, kita dapat melihat bahwa banyak lansia yang masih mampu produktif secara ekonomi. Hal ini turut menjadi tantangan, bagaimana menciptakan skema menjaga produktivitas lansia yang berarti memperpanjang masa kerja dan ketersediaan angkatan kerja.

## **6. Isu Meningkatnya Kebutuhan Perumahan**

Dampak kependudukan yang paling signifikan dalam pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya kebutuhan akan perumahan. Hal ini disebabkan terbatasnya lahan perumahan yang dapat disediakan tanpa merusak ketersediaan alam. Kebutuhan akan menjaga daya tampung lingkungan dalam bentuk lahan produktif dan ruang terbuka hijau, selalu memaksa terbatasnya ruang bagi perumahan. Pada sisi lain kebutuhan akan perumahan didukung oleh konsepsi masyarakat akan rumah tapak yang memiliki halaman, dan sulitnya membangun kesadaran rumah dalam bentuk vertikal seperti apartemen dan rumah susun. Terlebih konteks kultural yang kerap memaksa keluarga baru untuk memiliki rumah sendiri, yang secara langsung meningkatkan kebutuhan perumahan.

Kondisi ini memaksa untuk diambilnya model kebijakan yang mampu membuat proyeksi akan tingkat pertumbuhan penduduk terhadap penyediaan sarana perumahan pada satu sisi namun pada saat yang sama menjaga kemampuan lingkungan dengan tidak melakukan pembukaan wilayah bagi perumahan secara berlebihan.

## **7. Isu Menghadapi Pola Migrasi**

Migrasi menjadi isu yang serius, bukan hanya migrasi lokal antar daerah terlebih migrasi internasional antar negara. Jika pada migrasi lokal faktor ekonomi dan rekonstruksi pasca bencana menjadi faktor dominan, maka meningkatnya konflik pada beberapa negara menjadi faktor pendorong migrasi Internasional antar negara. Indonesia sendiri menjadi salah-satu negara tujuan migrasi internasional yang disebabkan karena konflik.

Migrasi sebagai bentuk mobilitas penduduk, pada dasarnya dapat menjadi faktor transformatif bagi suatu wilayah, yang dapat menjadi pendorong pembangunan. Namun hal ini dapat terjadi dengan syarat jika proses ini terencana dalam skema kebijakan yang efektif. Hal ini disebabkan migran merupakan kelompok paling inovatif dalam masyarakat, yang dapat memperkaya transfer pengetahuan dan kebudayaan pada suatu daerah. Kehadiran migran dapat meningkatkan angkatan kerja hingga membuka lapangan pekerjaan baru, sesuai dengan kualitas migran yang masuk ke dalam suatu daerah. Meski pada saat yang sama pengalaman Indonesia juga mengajarkan migrasi yang tidak terencana dengan baik dapat menjadi potensi konflik bagi suatu wilayah.

## **8. Isu Dampak Lingkungan**

Peningkatan jumlah penduduk, peningkatan standar hidup, dan konsumsi energi yang tinggi secara langsung berpengaruh terhadap berubahnya kondisi lingkungan. Pemanasan global sebagai dampak dari meningkatnya efek rumah kaca secara global, dan pada tingkat lokal

kita juga menghadapi dampak kerusakan lingkungan dan ambang batas daya tampung lingkungan. Perubahan lingkungan sebagai akibat dari perilaku masyarakat inilah yang perlu mendapat perhatian penting.

Isu lingkungan yang patut mendapat perhatian dalam hal ini diantaranya adalah meningkatnya limbah industri dan rumah tangga, kerusakan lingkungan, ketersediaan pangan, serta ketersediaan air bersih merupakan isu strategis yang perlu diperhatikan. Sebab meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengindahkan ketersediaan lingkungan pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

### **9. Isu pemanfaatan bonus demografi**

Dalam konteks Indonesia “Isu bonus demografi” merupakan isu sentral dalam kependudukan. Periode bonus demografi yang sedang dirasakan oleh Indonesia tentu saja mempunyai berbagai implikasi yang harus segera ditangani, baik implikasi yang bersifat positif maupun implikasi yang bersifat negatif.

Jendela peluang bonus demografi, mulai terbuka apabila jumlah dan proporsi penduduk usia muda mengalami penurunan serta akan berakhir pada saat proporsi penduduk usia tua tumbuh lebih cepat. Peluang bonus demografi akan terealisasi menjadi bonus demografi apabila entitas negara melakukan berbagai kebijakan investasi yang tepat menyangkut kualitas penduduk, sehingga tidak hanya dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB), namun juga dengan kebijakan peningkatan derajat kesehatan penduduk (baik laki-laki maupun perempuan) serta investasi dibidang pendidikan (laki-laki maupun perempuan) untuk meningkatkan kualitasnya. Namun demikian berbagai investasi dibidang kependudukan tersebut tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti

dengan penyediaan lapangan kerja (baik secara kualitas maupun kuantitasnya) bagi angkatan kerja baru tersebut.

Manfaat dari periode bonus demografi tidak hanya semata-mata bergantung pada struktur umur penduduk. Terdapat berbagai faktor yang menjadi prasyarat untuk merealisasikannya, dan yang cukup strategis adalah lanskap pekerjaan yang variatif, produktif dan menampung seluruh karakteristik pekerja, serta strategi investasi yang tepat. Namun demikian dalam konteks Indonesia, prasyarat tersebut menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar, mengingat disparitas waktu pencapaian periode bonus demografi antar wilayah baik antar provinsi maupun kabupaten/kota yang bervariasi, disparitas yang kedua menyangkut kemampuan fiskal atau anggaran pada setiap daerah yang berbeda-beda yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pondasi dan peluang ekonomi yang cukup rentan dan rendah pada daerah tersebut. Oleh karena peran aktif pemerintah daerah mempunyai signifikansi yang tinggi dalam periode ini, dan pemberian informasi perihal bonus demografi dan berbagai implikasi yang harus ditangani merupakan keharusan bagi para pengelola penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan.

#### **10. Isu pengasuhan anak, stunting dan gizi buruk**

Isu pembangunan keluarga juga menjadi isu tersendiri yang berkembang di Indonesia, isu pembangunan keluarga dititikberatkan pada isu kualitas dan pola asuh anak. Tingginya angka stunting yang ditemui dewasa ini disamping karena masalah kemiskinan pada keluarga tetapi juga akibat pola pemberian makanan pada anak yang tidak memperhatikan asupan gizi, hal ini diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan orang tua terhadap bahan makanan dan nilai gizi pada bahan makanan, pola makan yang menitikberatkan pada makanan-manakanan cepat saji juga menjadi permasalahan tersendiri dalam

memenuhi asupan gizi pada anak. Hilangnya pengetahuan orang tua pada bahan pangan akan menjadi ancaman terhadap kualitas generasi yang akan datang serta secara lebih jauh akan berpengaruh pada ketahanan pangan masyarakat.

### **11. Kemitraan dalam Mengatasi Persoalan Kependudukan**

Persoalan strategis dalam penyelesaian dampak kependudukan juga terikat dengan kemampuan struktural yang dimiliki. Luasnya cakupan wilayah dan dimensi dari dampak kependudukan memerlukan model kemitraan yang lintas sektoral dalam berbagai jenjang kewenangan. Integrasi berbagai pihak dalam satu model kebijakan yang komprehensif menjadi jalan prasyarat utama. Dimana kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi ketika terbentuk pembagian kerja sektoral yang jelas, ketersediaan data yang baik terhadap masalah yang dihadapi, serta analisis stakeholder yang terpadu.

#### **Hadirin Peserta Pertemuan yang Saya Hormati**

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut serta dalam rangka mendukung visi Pemerintah tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka BKKBN akan berkontribusi dalam upaya “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang” dengan berfokus kepada:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup;

4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah 2020-2024 dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu ditetapkan ukuran pencapaian Program dan Kegiatan Prioritas ke dalam Sasaran Strategis yang mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Menurunnya TFR dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 2024;
2. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) 61,78 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 % pada tahun 2024;
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need 8,6 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 % pada tahun 2024;
4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) dengan target 25/1000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18/1000 kelahiran pada tahun 2024;
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 53,57 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024;
6. Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP) 21,9 tahun pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 22,1 pada tahun 2024.

Tahun 2020 merupakan periode transisi peralihan RPJMN 2015-2019 menuju RPJMN 2020- 2024. Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-20 24, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional (PN) melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah:

1. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai, mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
  - a. Pengembangan GDPK lima pilar untuk seluruh tingkatan wilayah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Penguatan sinergisitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk;
  - c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan institusi pendidikan dari pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk;
  - d. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
2. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran (kelompok masyarakat), yang dapat terwujud melalui strategi:
  - a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terutama

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pasca Persalinan (KB-PP);

- b. Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melalui penguatan kemitraan;
  - c. Peningkatan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah khusus (daerah kesertaan KB rendah, tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, miskin perkotaan dan wilayah bencana), serta sasaran khusus (pria/suami, PUS *unmet need*, miskin, memiliki risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan anak *stunting*),-
  - d. Peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator/kelompok KB Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan MOP yang kompeten di setiap kabupaten dan kota;
  - e. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, termasuk pencegahan 4 (empat) terlalu kepada keluarga, PUS dan remaja;
  - f. Peningkatan kemandirian Pasangan Usia Subur dalam ber-KB.
3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga, yang diwujudkan melalui strategi:
- a. Penguatan kemampuan keluarga untuk menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal sesuai dengan siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran guna mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
  - b. Peningkatan kualitas/ketahanan remaja (Kelompok Usia Produktif) dan Penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja;
  - c. Penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang terstandarisasi dan pengembangan sistem rujukan yang dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan wilayah;

- d. Pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga;
  - e. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia.
4. Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program KKBPK sesuai dengan segmentasi sasaran dan karakteristik wilayah, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. Peningkatan advokasi Program KKBPK berbasis biaya dan manfaat serta pendekatan sosial kultural;
  - b. Peningkatan promosi Program KKBPK (Bangga Kencana) berdasarkan orientasi sasaran berbasis karakteristik wilayah;
  - c. Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD dalam penyuluhan Program KKBPK dan penyebaran materi/informasi terkini.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- a. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program KKBPK berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah
  - b. Pengembangan *smart technology* untuk memperkuat pengelolaan Program KKBPK

### **Hadirin yang Saya Hormati**

Kehadiran Undang Undang Pemerintahan Daerah yang diwarnai dengan semangat otonomi daerah di masa awal reformasi telah membawa dampak yang cukup serius dalam kebijakan di bidang kependudukan. Kebijakan kependudukan yang tidak konsisten dan kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap masalah kependudukan

semakin memprihatinkan. Kondisi tersebut diperburuk oleh pendapat yang mengatakan bahwa masalah kependudukan sudah diatasi oleh tiap-tiap sektor sehingga tidak perlu ditangani lagi, apalagi dalam bentuk lembaga atau instansi. Kondisi yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama ini telah melemahkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan yang menangani bidang kependudukan, baik dalam perencanaan program sampai dengan pada tahapan eksekusi kegiatan. Sikap dan kebijakan seperti itu menjadipemecahan masalah kependudukan dilakukan hanya pada tingkat permukaan atau akibatnya saja, sedangkan sebab dan akar masalahnya tidak pernah terpikirkan dan diatasi.

Faktor yang mempengaruhi situasi kependudukan di Indonesia sedemikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi yang kuat antar sektor dan kementerian/lembaga, serta antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Oleh karenanya, kemitraan merupakanpondasi dasar untuk pencapaian sasaran maupun target pembangunan yang telah ditetapkan. Karena itu harus disadari untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tidaklah mungkin kita dapat berjalan sendiri tanpa kemitraan lintas sektoral. Agenda pembangunan keluarga, kependudukan serta keluarga berencana yang sukses membutuhkan kemitraan lintas sektor dalam pemerintah baik dalam skala nasional maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sebuah kemitraan inklusif yang dibangun di atas prinsip dan nilai-nilai gotong royong, visi bersama, dan tujuan bersama yaitu kesejahteraan rakyat tanpa ada satupun yang tertinggal dalam falsafah Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, setiap sektor dalam skala nasional maupun

daerah harus bersedia untuk mencapai tujuan-tujuan ini secara bersama.

Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini seyogyanya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan. Berdasarkan pada harapan tersebut dengan memperhatikan karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang, dengan mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka suatu *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap persiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variabel yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan dibidang kependudukan.

**Hadirin yang Saya Hormati**

Wabah koronavirus telah menunjukkan kepada kita dampak lintas sektoral pada masalah kesehatan maupun kependudukan. Wabah ini membawa kecemasan dan horor di seluruh dunia. Dunia terkejut dan ketakutan melihat kecepatan jumlah korban, perkiraan rumah sakit yang penuh sesak, dan kemampuan negara dalam menanganinya.

Kita dapat melihat masalah kesehatan telah membawa dampak bagi sektor-sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, dan ketenagakerjaan negara-negara di dunia. Kerugian yang disebabkan oleh virus ini bukan hanya satu atau dua negara yang menderita. Hampir seluruh negara di dunia menderita karena mandegnya aktivitas ekonomi dalam skala besar.

Bagi Indonesia tentu saja menjadi berlipat-lipat dampaknya apabila kita semua secara individu maupun secara kelembagaan tidak turut serta dalam mengatasinya, pemahaman yang kurang baik akan wabah ini dan penanganannya akan membawa keresahan sosial dikalangan masyarakat yang memicu runtuhnya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, runtuhnya solidaritas, kesetiakawanan sosial dan jiwa gotong royong yang sudah berabad-abad kita miliki.

Fakta-fakta ini harus membuka mata kita untuk melihat dinamika kesehatan ini dengan perspektif yang lebih luas. Dalam perspektif kependudukan apa yang bisa kita petik pembelajarannya?

Dinamika kesehatan memiliki korelasi yang kuat dengan situasi kependudukan. Pelajaran yang sangat mahal yang harus kita semua sadari, bahwa data dinamika kependudukan itu sangat penting. Data keluarga, data struktur umur, data mobilitas serta data persebaran penduduk, data pencatatan kematian beserta dengan penyebabnya, data administrasi kependudukan, serta data dinamika kependudukan

lainnya. Data-data tersebut menjadi kunci yang penting dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan deteksi ataupun penanganan wabah maupun dampak-dampak sosial ekonominya, keberadaan data tersebut seharusnya ada dari level nasional sampai dengan level desa yang akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan.

Ketersediaan data dinamika kependudukan tersebut juga harus dibarengi dengan kemampuan untuk membaca dan menganalisis data, mengingat keberadaan data tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa ada kemampuan untuk membaca dan menganalisisnya sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran diberbagai bidang.

Untuk itu ke depan dengan berbagai revisi yang telah dilakukan terhadap Undang-undang pemerintahan daerah dewasa ini, diharapkan kelembagaan dibidang kependudukan dapat diperkuat baik secara kuantitas maupun kualitasnya, sehingga berbagai permasalahan kependudukan yang muncul dapat diatasi dengan baik di seluruh tingkatan wilayah.

Hal yang baik tersebut, tentu saja tidak serta merta terjadi, ada runtutannya, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya menekankan komitmen dari saudara Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Perwakilan Provinsi beserta jajarannya untuk secara konsekuen melaksanakan program yang sudah disusun secara efektif, tidak hanya diukur dari segi output atau pelaksanaannya saja, namun juga dari segi outcome, dampaknya kepada masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari proses pembangunan, kita harus bekerja lebih keras kembali untuk menegakkan citra lembaga kita, bahwa keberadaan kita itu penting dalam arena pembangunan di negara ini. Dan kepada perangkat daerah mari kita satukan tujuan, bersinergi dan

terus berkoordinasi, memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, baik itu DAK fisik maupun Bantuan Operasional Kegiatan, memanfaatkan sebesar-besarnya untuk memberikan dampak kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan kita bersama. Oleh karena itu, saya minta untuk para peserta untuk serius dalam mengikuti kegiatan ini dan nantinya melaksanakan rencana tindak lanjut yang akandihasilkan dari pertemuan ini, apa yang saudara susun itulah yang nantinya akan kami evaluasi pelaksanaannya di tahun mendatang.

Demikian sambutan dan arahan Saya, dengan mengucapkan Bismillahirohmannirohim, Saya buka secara resmi kegiatan **“KONSOLIDASI NASIONAL PROGRAM BANGGAKENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2020”**

Selamat melaksanakan kegiatan, semoga kita dapat memetik hasil diskusi yang bermanfaat untuk kita lakukan tindak lanjut langkah konkret dalam mencapai target program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau kita populerkan dengan akronim baru yaitu PROGRAM BANGGA KENCANA.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum wr. wb.